

Volume V, Nomor 1, Mei 2011
ISSN : 1978-3618

Terbit dua kali setahun, pada bulan Mei dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu ekonomi dalam berbagai aspek kajian

Pemimpin Redaksi:

Erly Leiwakabessy

Wakil Pemimpin Redaksi:

Andre Saptu
M. Ratmaserang

Redaktur Pelaksana:

Djufri R. Pattilouw

Wakil Redaktur Pelaksana:

Ali Tutupoho
Hendry D. Hahury

Tim Editor:

Maria K. Tupamahu
Taufik Tjio
Maryam Sangadji

Penyunting Ahli:

Stellamaris Metekohy
Latif Kharié
Fachruddin Ramly
La Ode Abdul Rasjid
Asmaria Latuconsina
Izaak T. Matitaputty

Alamat Redaksi

Lt.2 Kampus Fak. Ekonomi Unpatti
Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon
K.P. 97233, Telp 0911-322579
e-mail: redc1tek@gmail.com

Redaksi menerima sumbangan artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Format artikel harus sesuai dengan petunjuk penulisan yang tercantum di halaman belakang jurnal ini. Naskah yang masuk akan dievaluasi, ditelaah dan disunting untuk menyeragamkan format penulisan, gaya selingkung serta demi menjaga kualitas isi jurnal

DAFTAR ISI

**Analisis Pengaruh Biaya Pemasaran Jeruk Kisar
Terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan Kisar
Kabupaten Maluku Barat Daya**

Selvenco F. Tuasuun
hal. 1-10

**Analisis Perbandingan Potensi Ekonomi
Kota dan Kabupaten Pekalongan, 2001-2008**

Agus Arifin
hal. 11-24

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Produk Abc
Di Kota Ambon**

R. Wilda Payapo
hal. 25-44

**Analisis Pengelolaan Potensi Kekayaan Alam Sebagai Tambahan
Pendapatan Negeri Kulur**

Fauzia Tutupoho
hal. 45-59

Service Dominant Logic Dan E-Commerce Dalam Pemasaran

Jupiter Dakael
hal. 60-71

Isu Gender Dalam Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia

Fransiska N Ralahallo
hal. 72-83

Analisis Program Pendeteksian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Trisna Sary Lewaru
hal. 84-90

ANALISIS PROGRAM PENDETEKSIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Trisna Sary Lewaru

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jln. Ir. M. Putuhena, Kode Pos : 97233 Ambon
e-mail: t_sary_l@yahoo.com)

Abstract

This research is aimed for construct a corruption detection program that appropriate to the society expectation. The data collecting are done by spreading questioners to 10 provinces in Indonesia. About 600 questioners are spread and 473 returned are used as the data. The hypothesis employs one t test sample and Pearson correlation test. The result of the analysis show that there are needed to internal control, data mining and hotlines.

Keywords: *Corruption, Internal Control, Data Mining, Hotlines.*

I. PENDAHULUAN

Istilah korupsi dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan - tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasan korupsi telah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Usaha memberantas korupsi ini sudah menjadi masalah global, bukan lagi nasional atau regional. Pada beberapa negara

kebijakan untuk memberantas korupsi memiliki beberapa unsur yang sama yakni : penyusunan program-program yang tepat; perubahan struktur dan metode pemerintahan agar ada tanggung gugat; perubahan sikap moral dan etika; dan barangkali yang terpenting, keterlibatan dan dukungan pemerintah, sektor dunia usaha, dan masyarakat sipil (Pope, 2000).

Penelitian Deck (1985), yang memfokuskan pada dua strategi utama yang dapat digunakan oleh manajer dan auditor dalam menangani masalah korupsi yaitu metode *prevention* dan *detection*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk pencegahan fraud bagi manajemen adalah mendirikan sistem yang kuat dari internal kontrol. Sedangkan, agar efektif dalam mendeteksi korupsi, auditor harus membangun sebuah "*attitude of professional skepticism*" yang mencakup *mechanical*

performance dari prosedur pengauditan dan secara kontinyu siap siaga untuk kemungkinan *fraud* dalam semua pekerjaan audit.

Sedangkan berdasarkan laporan dari Kutz (2006), menyatakan bahwa salah satu elemen penting yang seharusnya terdapat dalam sistem pencegahan korupsi meliputi *detection*. Dalam mendeteksi tindak pidana korupsi sangat diperlukan kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat tentang potensi terjadinya korupsi. Untuk itu, yang menjadi petunjuk awal sebagai sumber keterangan tentang terjadinya tindak pidana korupsi biasanya dari :

1. *Whistleblower*: orang yang mau membocorkan informasi. Biasanya berasal dari konflik manajemen antara lain : serikat pekerja, aparat pengawasan pemerintahan (BPK, BPKP, Itjen, Itwil, SPI), kontraktor/ supplier yang kalah dalam tender, lawan politik, dll.
2. Mempelajari kelemahan sistem dan internal control suatu objek proyek dengan dana besar, pengadaan barang dan jasa, *workflow*, dll.

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat dapat ikut berpartisipasi sebagai *whistleblower*. Hal ini diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keikutsertaan masyarakat ini sejalan dengan pendapat Zamrony (2008), bahwa pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika semua elemen bangsa (pemerintah,

aparat penegak hukum, masyarakat) bersatu. Selanjutnya untuk dapat mengungkap terjadinya penyimpangan secara jelas perlu dilakukan investigasi terhadap penyimpangan tersebut melalui audit investigasi.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan program pendeteksian tindak pidana korupsi di Indonesia yang sesuai dengan harapan masyarakat.

II. PROGRAM PENDETEKSIAN KORUPSI

Dalam mendeteksi penyimpangan sangat diperlukan kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat tentang potensi terjadinya kecurangan / korupsi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Douglas E. Ziegenfuss (1995) menyatakan bahwa "*fraud is a significant problem for governments today and one that can be reasonably expected to grow.*" Menurutnya untuk mendeteksi korupsi metode yang efektif meliputi :

- *Internal audit review;*
- *Specific investigation by management;*
- *Employee notification;*
- *Internal controls; and*
- *Accidental discovery*

Secara relative penelitian Douglas ini memandang bahwa korupsi dapat dideteksi dengan kelompok eksternal untuk entitas *government (customers, suppliers, external auditors, etc.)*. hal ini didukung penelitian oleh Hunt, et al (1989), yang menyatakan bahwa "*Corporate values influence organizations' product and service quality, advertising content, pricing policies, treatment of employees, and relationships with customers, suppliers, communities, and the environment*".

Sedangkan berdasarkan pengalaman Amerika dalam mencegah terjadinya kecurangan / korupsi pada program bantuan bencana alam badai Katrina dan Rita, bahwa untuk mengatasi terjadi kecurangan, ada tiga program pemberantasan korupsi yang dirancang oleh Kutz (2006). Salah satu programnya adalah program detection yang meliputi :

- *Data mining*
- *Fraud Hotlines*

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Pengendalian Internal perlu dipertimbangkan dalam program pendeteksian tindak pidana korupsi
- H2 : *Data Mining* perlu dipertimbangkan dalam program pendeteksian tindak pidana korupsi
- H3 : *Hotlines* perlu dipertimbangkan dalam program pendeteksian tindak pidana korupsi

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dari 10 propinsi. Keterlibatan masyarakat dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Pope (2000), bahwa upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi tetapi tanpa melibatkan masyarakat sipil, akan sia-sia karena tidak memanfaatkan salah satu alat yang paling berpotensi dan ampuh.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer (*primary data* yang langsung diperoleh dari jawaban kuisisioner yang diterima. Jawaban yang disediakan adalah; sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), netral (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1).

Untuk menguji kualitas data maka dilakukan uji realibilitas dan uji validitas. Dalam penelitian ini validitas diuji dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment (PPM) dan hasilnya diketahui bahwa semua pernyataan dalam kuesioner telah valid. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik *cronbach's alpha*, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa semua konstruk pertanyaan adalah reliabel.

C. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui apakah suatu variabel perlu dipertimbangkan dalam program pendeteksian tindak pidana korupsi maka analisis data dilakukan dengan menggunakan *one sample t-test*. Dimana peneliti menetapkan skor per item pernyataan dalam kuesioner harus ≥ 4 sebagai skor minimum yang bisa mencerminkan kesetujuan responden terhadap perlunya variabel-variabel dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk menguji hubungan antar variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pendeteksian tindak pidana korupsi, menggunakan analisis bivariat dengan teknik korelasi *pearson* yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 15.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini kuesioner diedarkan secara merata di sepuluh propinsi di Indonesia meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 600 dan yang kembali sebanyak 473. Berikut hasil analisis deskriptif karakteristik responden :

Tabel 4.1
Hasil Deskriptif Karakteristik Responden

No	Keterangan	Σ	%
1	Pendidikan:		
	• SMU	142	30,0%
	• Diploma	15	3,2%
	• Sarjana	259	54,8%
	• Pasca Sarjana	57	12,1%
	• Lainnya	-	-
2	Pekerjaan:		11
	• PNS	242	51,2%
	• Pekerja Swasta	60	12,7%
	• Wiraswasta	9	1,9%
	• Lainnya	222	34,2%

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif karakteristik responden pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh sarjana yaitu sebesar 54,8%. Dan untuk pekerjaan responden didominasi oleh PNS sebesar 51,2%.

Untuk menguji variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pendeteksian tindak pidana korupsi maka dilakukan uji *one sample t-test*. Berikut adalah tabel yang menyajikan ringkasan hasil pengujian tersebut.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian *One Sample t-test*

No	Hipotesis	Ho	H1	t hitung	t table	Kesimpulan
1	Hipotesis 1	$\mu_4 \leq 8$	$\mu_4 > 8$	17,133	1,645	Tolak Ho
2	Hipotesis 2	$\mu_2 \leq 12$	$\mu_2 > 12$	6,785	1,645	Tolak Ho
3	Hipotesis 3	$\mu_1 \leq 12$	$\mu_1 > 12$	14,497	1,645	Tolak Ho

Sumber: Hasil Perhitungan

Dari hasil pengujian *one sample t-tets* diatas, dapat dilihat bahwa hipotesis null ditolak untuk keseluruhan variabel, karena nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel. Berikut interpretasi dari hasil pengujian tersebut :

1. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pengendalian internal perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan program pendeteksian tindak pidana korupsi.
2. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa *data mining* perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan program pendeteksian tindak pidana korupsi.

3. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa *hotlines* dipertimbangkan dalam melaksanakan program pendeteksian tindak pidana korupsi.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program pendeteksian tindak pidana korupsi perlu untuk mempertimbangkan pengendalian internal, *data mining*, *hotlines*. Tabel berikut akan menyajikan hasil pengujian korelasi antar seluruh variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.3
Hasil Korelasi Antar Variabel Dalam Program Pendeteksian Tindak Pidana Korupsi

Var	Keterangan	DM	H	Ket
PI	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.496(**) .000	.525(**) .000	Tolak Ho
DM	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)		.646(**) .000	Tolak Ho

Sumber: Hasil Perhitungan

Keterangan:

PI : Pengendalian internal

DM : *Data mining*

H : *Hotlines*

Dari hasil uji korelasi diatas, dapat diketahui bahwa seluruh angka signifikansi yang diperoleh kurang dari α 0,05. Hal ini berarti semua variabel signifikan, dengan kata lain ada hubungan korelasional antara variabel *data mining*, *hotlines*, pengendalian internal.

Adapun skor masing-masing hubungan adalah sebagai berikut: hubungan antara pengendalian internal dengan *data mining* sebesar 49,6%;

hubungan antara pengendalian internal dengan *hotlines* sebesar 52,5%; hubungan antara *data mining* dengan *hotlines* sebesar 64,6%.

Berdasarkan pada patokan angka kuat lemahnya hubungan kedua variabel, maka hubungan antara pengendalian internal dengan *data mining* merupakan hubungan yang kuat; hubungan antara pengendalian internal dengan *hotlines* merupakan hubungan yang kuat; hubungan antara *data*

mining dengan *hotlines* merupakan hubungan yang kuat.

Dari hasil analisis tersebut, maka penulis akan mengambil korelasi antar variabel yang masuk kategori kuat, yang dinilai sebagai variabel dominan

dipertimbangkan masyarakat dalam melaksanakan program pendeteksian tindak pidana korupsi. Berikut adalah tabel yang menyajikan korelasi antar variabel yang masuk dalam kategori tersebut.

Tabel 4.4
Korelasi Kuat Antar Variabel

Variabel	Variabel	
	<i>Data Mining</i>	<i>Hotlines</i>
Pengendalian Internal	√	√
<i>Data Mining</i>		√

Sumber: Hasil Perhitungan

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel yang dominan dipertimbangkan dalam melaksanakan program pendeteksian tindak pidana korupsi yaitu:

1. Pengendalian internal berkorelasi kuat dengan *data mining*, *hotlines*.
2. *Data mining* berkorelasi kuat dengan *hotlines*.

Berdasarkan korelasi yang masuk kategori kuat maka dapat disarikan bahwa pelaksanaan program pendeteksian tindak pidana korupsi yang diharapkan oleh masyarakat adalah Pengendalian internal, *Data mining*, *Hotlines*.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa menurut masyarakat dalam merancang program pendeteksian tindak pidana korupsi perlu untuk mempertimbangkan pengendalian internal, *data mining*, dan *hotlines*. Jika dibandingkan dengan program pendeteksian tindak pidana korupsi yang

dijalankan saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa program pendeteksian tindak pidana korupsi yang diinginkan masyarakat lebih ketat dibandingkan dengan pelaksanaan program pendeteksian tindak pidana korupsi saat ini. Untuk itu disarankan agar pembuatan *hotline* (layanan yang beroperasi 24 jam) perlu diefektifkan karena akan mendukung dalam proses investigasi dan dapat membantu mengidentifikasi dan mendeteksi berbagai kecurangan yang tidak dapat dikontrol.

REFERENSI

- Deck, Glenn E., 1985, "*Controlling Employee Fraud: Strategies For Managers And Auditors*", *Public Budgeting & Finance/Summer*.
- Hamzah, J. A., 2005, "Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara", Sinar Grafia, Jakarta

- Kutz, Gregory.D., 2006, "*Framework For Fraud Prevention, Detection, And Prosecution*", GAO
- Pope, J. (Masri Maris), 2000, "Strategi Memberantas Korupsi", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Zamrony, 2008, "Pemberantasan Korupsi: Topik Out Of Date Yang Selalu Up To Date", Bahan Kuliah Umum, www.google.com
- Ziegenfuss, Douglas E., 1995, "*State And Local Government Fraud Survey For 1995*", *Managerial Auditing Journal*